

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 269.000.000 penduduk yang tersebar di beberapa provinsi berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019. Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup besar tersebut, Indonesia mempunyai beraneka ragam permasalahan sosial yaitu seperti tingkat kejahatan yang tinggi, swasembada pangan, masalah ekonomi dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang masih terjadi di negara berkembang, termasuk negara Indonesia (Hadikristanto, Wahyu & Suprayogi, 2019). Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang ada di negeri ini. Kemiskinan terjadi tetapi kehidupan yang bermartabat sebagian dari hak-hak manusia yang paling dasar tidak memenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagian dari hak-hak manusia yang paling dasar. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memiliki pekerjaan yang baik dan kehidupan yang baik, dan untuk memiliki tempat tinggal yang baik. Akibatnya, fokus penelitian ini adalah pada orang-orang yang tidak mampu atau tidak mau bekerja. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistika), proporsi orang yang bekerja di industri makanan di Indonesia pada Maret 2019 adalah 9,41 %, dan jumlah total orang yang bekerja di industri makanan di Indonesia pada Maret 2019 adalah 25,14 juta jiwa. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk memerangi kemiskinan. Kontribusi ini dibuat untuk memungkinkan orang di seluruh dunia memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Bantuan dari pemerintah sangat diharapkan oleh banyak masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu atau berekonomi rendah (Ifon Purnama et al., 2020).

Data di BPS berubah setiap tahunnya, yang mengakibatkan para penerima bantuan yang seharusnya layak mendapatkan bantuan dari pemerintah kini tidak mendapatkan bantuan sedikitpun. Oleh karena itu pengklasifikasian harus menghasilkan data yang tepat dan terperinci karena dari data tersebut penyaluran bantuan menjadi tepat sasaran dan bisa digunakan dengan sebaik mungkin oleh orang-orang yang membutuhkannya, seperti yang telah tertulis pada undang-undang dasar bahwa setiap warga Indonesia mempunyai hak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak (Setiawan, Helilintar & Wahyniar, 2021).

Dari hasil wawancara awal yang didapatkan dari ketua bidang PKH, didapatkan bahwa masih banyaknya masyarakat di Pidie Jaya yang kurang mampu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berusaha membantu masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan satu program penanggulangan kemiskinan (Magfiroh, 2016). Karena adanya Program bantuan Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2007. Program Perlindungan Sosial, yang biasa dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) di dunia internasional, terbukti sangat efektif dalam memerangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendapatan bersyarat dari pemerintah untuk diberikan kepada rumah tangga yang membutuhkan, menurut Kantor Kementerian Sosial (RTM). Kepala dusun, dalam banyak kasus, memilih penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desa.

Kriteria lain dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah adanya anak haram, anak usia lima sampai tujuh tahun yang belum sekolah, anak usia tujuh sampai tujuh tahun yang belum sekolah, seorang anak antara usia tujuh dan tujuh yang belum mulai sekolah, dan seorang anak antara usia lima belas dan delapan belas yang belum mulai sekolah. Kesalahpahaman yang sering terjadi di antara mereka yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan program ini. Misalnya, jika suatu masyarakat memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, maka kemungkinan besar akan menjadi anggota Program Keluarga Harapan (PKH)

lebih besar daripada masyarakat yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah.

Umumnya pemilihan penerima PKH di desa dilakukan oleh kepala dusun. Adapun cara agar terhindar dari adanya penentuan penerima PKH secara subjektif, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatasi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pihak desa atau pemerintah dalam proses pengambilan keputusan penerima PKH.

Metode yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan adalah metode *naïve bayes*. Metode *naïve bayes* merupakan salah satu metode pengklasifikasi yang memprediksi berdasarkan probabilitas keanggotaan untuk setiap kelas (Susanti, Rosita & Hanum, 2018).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini akan meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi yang akan membantu dalam seleksi pelamar Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan kriteria seperti penghasilan perbulan, jumlah tanggungan, usia dini, bumil, anak sd, anak smp, anak sma, lansia dan disabilitas di Rumah Tangga Miskin (RTM). Oleh karena itu, untuk memperoleh pekerjaan yang fleksibel, diperlukan sistem komputerisasi yang dapat digunakan untuk menyaring pelamar Program Keluarga Harapan (PKH), apakah memenuhi syarat atau tidak. Penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir yaitu "**Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Penerimaan Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Naive Bayes**" dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar Belakang yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode *naïve bayes* dalam peyeleksian penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan *input* (kriteria) yang ditentukan?
2. Apakah penggunaan metode *naïve bayes* dapat membantu dalam menentukan kelayakan penerima bantuan PKH ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dibangun pada sistem yang akan dibangun adalah:

1. Metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima PKH adalah metode *naïve bayes*.
2. Kriteria yang digunakan didalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan penerima PKH yaitu : penghasilan perbulan, jumlahART/tanggungan, jumlah usia dini, bumil, anak SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Membangun sebuah sistem untuk mempermudah dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Menerapkan metode *Naïve Bayes* dalam penentuan kelayakan penerima bantuan PKH.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan ialah :

1. Dengan adanya aplikasi ini, memberi kemudahan dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan PKH.
2. Menambah pengetahuan penulis dalam hal merancang Sistem PengambilanKeputusan (SPK) dengan metode *naïve bayes*.

1.6 Relavansi

Setelah pembuatan sistem ini selesai, dapat membuat keputusan secara akurat dan subjektif untuk membantu menentukan kelayakan penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH) dengan kriteria yang sudah ditentukan.

